

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan yang sangat penting dalam perekonomian Jambi karena komoditi ini memberikan kontribusi yang sangat besar pada Produk Domestik Bruto dan nilai ekspor sektor pertanian, selain itu komoditi ini juga memberikan kontribusi yang besar pada penyerapan tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian berkontribusi sebesar 29,77% terhadap struktur perekonomian Provinsi Jambi dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 2,49%. Kinerja positif lapangan usaha pertanian, antara lain ditopang oleh peningkatan produksi TBS kelapa sawit. uga disertai dengan berangsur pulihnya harga TBS kelapa sawit di tingkat lokal yang secara level mulai menunjukkan perbaikan dari Rp2.045,59/kg pada triwulan sebelumnya menjadi Rp2.505,54/kg pada triwulan laporan (Laporan Perekonomian Bank Indonesia, Februari 2023).

Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Jambi selain karet, kelapa dalam, kopi, cassiavera, pinang, dan teh karena kelapa sawit menjadi sumber pendapatan daerah dan sebagian besar petani. Walaupun harga kelapa sawit mengalami naik-turun tetapi petani tetap mengusahakan tanaman kelapa sawit sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusianya.

Salah satu masalah yang mengancam masa depan kebun kelapa sawit adalah adanya kebun-kebun kelapa sawit yang tidak produktif lagi karena sudah tua atau rusak. Kebun kebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif tersebut dari tahun ke tahun selalu bertambah karena kegiatan peremajaan kebun tidak berjalan dengan lancar. Sesuai daur umur teknis tanaman kelapa sawit, setelah berumur 25 tahun perlu diremajakan. Selain itu, tanaman swadaya yang menggunakan benih tidak unggul (illegitim) meskipun belum memasuki umur 25 tahun, dengan produksi kurang dari 10 ton/ha/tahun juga perlu diremajakan. Berikut data jumlah kebun sawit yang tua dan rusak di Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 1. Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Provinsi Jambi Menurut Kabupaten pada Tahun 2021

Kabupaten	TBM Ha	TM Ha	TTM/TR Ha	Jumlah	Produksi	Jumlah Petani
Batanghari	31.298	173.261	12.657	217.215	508.653	56.905
Ma. Jambi	29.284	162.629	32.548	224.461	393.737	72.194
Bungo	34.043	77.672	19.047	130.762	299.431	29.864
Tebo	15.970	72.057	10.035	98.062	216.802	25.613
Merangin	27.629	58.718	44.361	130.708	211.177	56.550
Sarolangun	18.858	69.252	4.843	92.953	214.931	27.661
Tanjabbarat	32.407	94.200	7.771	134.378	248.600	28.286
Tanjabtim	12.281	51.647	6.641	70.568	108.776	14.112
Kerinci	65	19	-	84	14	40
Jumlah	201.835	759.455	137.902	1.099.191	2.202.122	311.225

Sumber : Buku Data Statistik Perkebunan (ATAP) Provinsi Jambi, Tahun 2021

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Tahun 2021 terdapat 137.902 Ha kebun sawit yang tidak berproduksi baik atau telah mencapai umur lebih dari 25 tahun atau berproduksi rendah. Luasan tersebut merupakan 12,55% dari luas perkebunan sawit di Provinsi Jambi. Dari jumlah angka tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak (TTM/TR), seluas 34.769 Ha dari perkebunan swasta dan sisanya 103.132 Ha dari perkebunan rakyat. Hampir 75% berasal kebun swadaya dan ini perlu diantisipasi untuk segera diremajakan. (Buku Data Statistik Perkebunan (ATAP) Provinsi Jambi, 2021).

Petani mengalami kesulitan untuk meremajakan kebunnya. Petani mempunyai akses terbatas ke sumber pembiayaan, sumber pengetahuan dan sumber teknologi serta kemampuan manajemennya masih kurang. Petani memerlukan bantuan dari pemerintah dan atau dari pihak lainnya untuk meremajakan kebun sawitnya. Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (PSR) sangat dibutuhkan oleh petani pekebun komoditi kelapa sawit di Provinsi Jambi, mengingat sudah banyaknya kebun kelapa sawit petani pekebun yang sudah memasuki usia peremajaan berpotensi sangat merugikan jumlah produksi, produktifitas dan pendapatan yang diterima petani pekebun. Kegiatan PSR ini akan diintegrasikan ke seluruh aspek dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik pekebun.

Pemerintah Provinsi Jambi sejak pada tahun 2007 telah berupaya untuk mengatasi permasalahan luasannya kebun kelapa sawit yang tua dan rusak dengan melalui pembinaan/pengawasan penangkar bibit kelapa sawit, melaksanakan penyuluhan tentang bibit kelapa sawit palsu, melaksanakan pembuatan bibit sawit bersubsidi mulai dari tahun 2005 serta melaksanakan Demontrasi Plot (DEMPLLOT) peremajaan melalui dana APBN maupun dari dana APBD melalui program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat dengan Pengembangan Model-model Peningkatan Produksi Kelapa Sawit.

Kemudian pada tahun 2015, cikal bakal hadirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit selanjutnya disebut BPDPKS memberikan harapan bagi para petani untuk meremajakan kebun kelapa sawitnya. Badan ini menyediakan dana dana yang relevan dengan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat seperti dana hibah untuk peremajaan, sertifikat lahan, pelatihan petani dan lain lain.

Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 jo Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan perundangan tersebut, selain menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran, juga menjadi landasan pemberian dana untuk Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat pekebun melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

BPDPKS ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Peremajaan perkebunan kelapa sawit diwujudkan melalui program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (PSR) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 2017. Kegiatan peremajaan diorientasikan sebagai upaya dalam membangun pengelolaan perkebunan kelapa sawit masyarakat/pekebun sesuai dengan standar teknis budidaya kelapa sawit dan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan peremajaan merupakan program kerja dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Jumlah alokasi distribusi target peremajaan kelapa sawit pekebun untuk Provinsi Jambi sejak Tahun 2017 sebagai berikut :

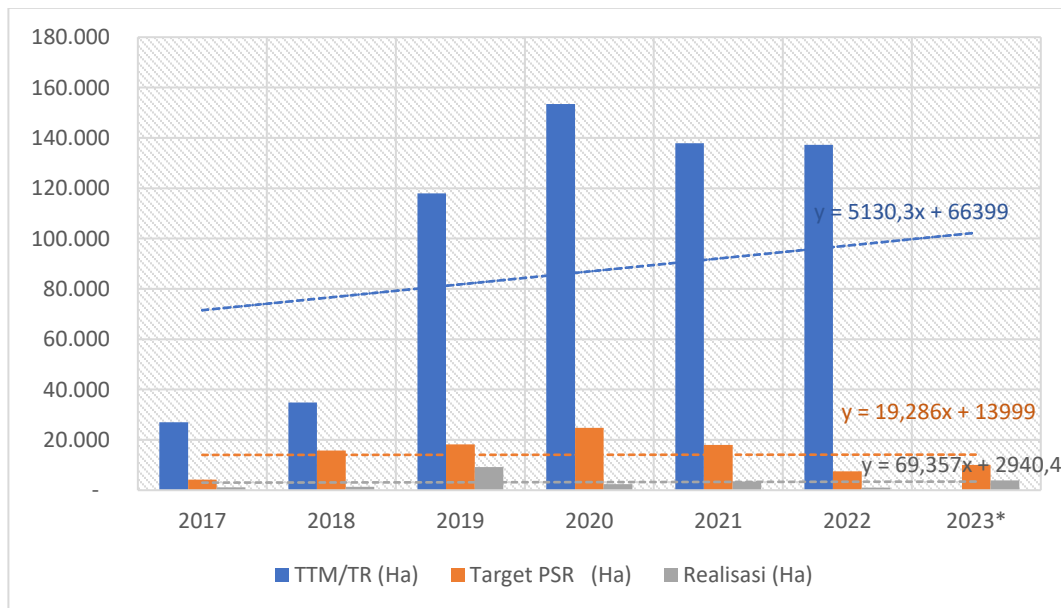
Tabel 2. Rekapitulasi Luas TTM/TR Tanaman Kelapa Sawit, Target dan Realisasi Luas dan Dana PSR Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Tahun	TTM/TR (Ha)	Target PSR		Realisasi (Ha)	Total Dana Tersalur (Rp)
		(Ha)	(%)		
2017	27.054	4.245	15,69	1.178	29.449.927.500
2018	34.794	15.737	45,23	1.351,1321	33.778.302.500
2019	117.977	18.251	15,47	9.150,3523	234.783.232.500
2020	153.479	24.800	16,16	2.383,6884	71.510.652.000
2021	137.902	18.000	13,05	3.491,8969	104.756.907.000
2022	137.236	7.500	5,47	1.072,8678	32.186.034.000
2023*		10.000		3.896,9884	116.909.652.000
Jumlah		98.533		22.524,9228	623.374.707.500

- Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2023

Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, luas tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak pada kebun kelapa sawit menunjukkan tren yang terus meningkat, hal ini nampaknya menjadi bahan perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dalam menentukan kebijakan luas target PSR yang juga terus bertambah, namun sayangnya realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2023 nampaknya angka luas tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak pada kebun kelapa sawit sudah mengalami penurunan, salah satunya menunjukkan program ini cukup berpengaruh secara signifikan dan bermanfaat bagi petani. Untuk lebih jelas tren terkait Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat ini disajikan pada grafik berikut :



Gambar 1. Grafik Perbandingan Luas TTM/TR Tanaman Kelapa Sawit, Target dan Realisasi Luas dan Dana PSR Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Dalam pelaksanaannya, target realisasi fisik PSR kerangka pendanaan BPDPKS di Provinsi Jambi kerap kali tidak terpenuhi bahkan jauh dari kebutuhan TTM/TR yang perlu diremajakan. Selain didukung oleh seluruh stakeholder kebun sawit, program peremajaan kebun sawit juga harus dilakukan secara bersama sama agar skala ekonomi kegiatannya mencukupi. Petani perlu berhimpun dalam kelembagaan dan mengajukan pinjaman kredit bersama ke bank dan dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 175/Kpts/SR.210/04/2021 tentang Standar Biaya Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021, standar biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat meliputi pekerjaan P0 yaitu pembukaan lahan dan penanaman terdiri dari tenaga kerja, infrastruktur, bahan dan alat, P1-P3 yaitu pemeliharaan terdiri dari tenaga kerja serta bahan dan alat. Nilai biaya peremajaan wilayah Jambi berkisar Rp. 46.045.633-Rp. 65.054.633 di lahan kering/mineral. Sedangkan, dalam program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat, BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat peserta PSR hanya sebesar Rp. 30 juta per ha/pekebun yang awalnya hanya sebesar Rp. 25 juta per ha/pekebun dengan syarat pekebun mau dan

mampu melaksanakan kegiatan PSR yang sesuai anjuran teknis budidaya oleh Pemerintah.

Pada kenyataannya, Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (PSR) yang diajukan Poktan/Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya diajukan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (RKP3KS). Dimana, RKP3KS meliputi biaya peremajaan dari P0-P3 dengan menerapkan teknis budidaya perkebunan yang baik dan biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi petani. Pemanfaatan biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut diberikan untuk (a). biaya peremajaan tahap awal yang meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemeliharaan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan peremajaan dan (b). biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat.

Berdasarkan RKP3KS yang diajukan, biaya Peremajaan Sawit Rakyat yang saat ini Rp 30 juta per hektar/pekebun pada sebagian besar pekebun, masih kurang dari kebutuhan, hanya cukup untuk pembiayaan di tahap awal. Terdapat tiga model skema pembiayaan yang bisa diterapkan dalam program ini berdasarkan kemampuan pekebun yaitu :

1. **Skema pertama** adalah kebutuhan biaya dipenuhi dari dana bantuan BPDPKS sebesar Rp. 30 juta/ha/pekebun ditambah dengan dana tabungan milik pekebun.
2. **Skema kedua**, kebutuhan dana pembiayaan dipenuhi dari dua sumber, yakni memanfaatkan dana bantuan BPDPKS dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pekebun.
3. **Skema ketiga**, dana pembiayaan diperoleh dari tiga sumber yakni bantuan BPDPKS, tabungan pekebun, dan KUR.

Selisih biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang tidak dapat dipenuhi dari bantuan BPDPKS, harus dipenuhi dengan dana lain baik itu tabungan milik pekebun, Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau keduanya. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada Kegiatan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0° 53' – 01° 41' Lintang Selatan dan antara 103° 23' - 104° 21' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 5 009,82 Km² (Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2023). Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, total Luas areal kelapa sawit seluas 134.378 Ha, terdiri dari perkebunan sawit rakyat 84.985 Ha dan perkebunan besar swasta 49.393 Ha. Sebagian dari kebun sawit rakyat tersebut, 41.600 Ha ditanam tahun 1991 s/d 1998 melalui Pola PIR-Trans dan Pola PIR KKPA. Kebun PIR-Trans dan PIR KKPA tersebut, 50 % ($\pm$ 20.000 Ha/ 9081 KK Pekebun) dengan kondisi kebun kurang produktif, produksi rata-rata sudah dibawah 10 Ton/Ha/ Tahun. (Buku Data Statistik Perkebunan (ATAP) Provinsi Jambi, 2021). Berikut data realisasi PSR Provinsi Jambi 2017-2023.

Tabel 3. Realisasi PSR pada Kabupaten di Provinsi Jambi dari Tahun 2017 s.d. 2023

Kabupaten	Jumlah Kelembagaan	Jumlah Pekebun	Rekomtek BPD PKS (Ha)	Biaya Peremajaan yang Ditransfer dari BPD PKS (Rp. juta)	Realisasi Biaya Peremajaan	
					(Rp. juta)	(%)
Batanghari	19	1070	1.660	43.201	33.882	78,43
Muaro Jambi	21	1395	3.170	87.820	70.618	80,41
Bungo	9	381	778	21.157	20.544	97,10
Merangin	48	2004	3.771	104.847	90.353	86,18
Tanjung Jabung Barat	14	2572	7.169	183.955	137.416	74,70
Tebo	14	803	1.671	47.224	30.369	64,31
Sarolangun	11	655	1.389	39.703	26.425	66,56
Total	136	8880	19.612,4809	527.910.304.000	409.610.	77,59

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2023

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten dengan realisasi serapan PSR terbesar di Provinsi Jambi. Pekebun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sampai kondisi awal Juli 2023 (5 Juli 2023) melalui pemanfaatan dan BPD PKS telah merealisasikan PSR (Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat) seluas 7.169,9189 Ha yang melibatkan 2.572 KK pekebun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi PSR pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi dari Tahun 2017 s.d. 2023

Lembaga Pekebun	Nomor Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Pekebun	Rekomtek BPDPKS (Ha)	Biaya Peremajaan yang Ditransfer dari BPDPKS (Rp)	Realisasi Biaya Peremajaan	
					(Rp)	(%)
Kud Sawit Kita	1968/PI.400/E/12/2017	84	171,1775	4.279.437.500	4.222.493.363	98,67
Kud Karya Jaya	1272/PI.400/E/11/2018	261	751,9243	18.798.107.500	18.625.724.618	99,08
Koperasi Manunggal Jaya	1380/PI.400/E/12/2018	78	220,8717	5.521.792.500	5.266.989.280	95,39
Kud Mukti Raharjo	467/PI.400/E/6/2019	160	427,7106	10.692.765.000	9.775.720.000	91,42
Kud Harapan Jaya	469/PI.400/E/6/2019	206	653,5341	16.338.352.500	16.103.907.000	98,57
Kud Bina Usaha	468/PI.400/E/6/2019	231	717,6580	17.941.450.000	14.496.005.156	80,80
Kud Suka Makmur	788/PI.400/E/8/2019	617	1.594,8909	39.872.272.500	10.083.795.000	25,29
Kud Panca Mukti	1532/PI.400/E/12/2019	194	568,3781	14.209.452.500	8.354.531.300	58,80
Kud Agro Makmur	1244/PI.400/E/10/2019	159	458,0718	11.451.795.000	11.290.298.000	98,59
Kud Sawit Kita	1499/PI.400/E/12/2019	227	606,8362	15.170.905.000	15.114.820.529	99,63
Kud Karya Jaya	493/PI.400/E/4/2020	23	57,2612	1.431.530.000	1.360.380.310	95,03
Kud Karya Kita	698/PI.400/E/6/2020	208	586,3496	17.590.488.000	14.009.928.647	79,64
Koperasi Unit Desa (Kud) Harapan Jaya	801/PI.400/E/6/2020	83	250,6254	7.518.762.000	6.335.150.000	84,26
Koperasi Unit Desa (Kud) Mukti Raharjo	803/PI.400/E/6/2020	41	104,6295	3.138.885.000	2.376.511.000	75,71
JUMLAH		2572	7.169,9189	183.955.995.000	137.416.254.203	74,70

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2023

KUD Sawit Kita di Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, didirikan sesuai akta badan Hukum Nomor 976/BH/XV tanggal 17 Oktober 1991 dengan jumlah anggota saat ini mencapai 510 orang. KUD Sawit Kita merupakan kelembagaan yang pertama kali mendapatkan biaya PSR kerangka BPDPKS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahkan saat ini telah mengajukan tambahan PSR tahap 2. Pada tahap 1, KUD Sawit Kita telah merealisasikan dana PSR sebesar 98,67%.

Pemanfaatan dana PSR merupakan permasalahan yang perlu diteliti. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi pola pemanfaatan dana PSR adalah siapa pelaksana kegiatan ini nantinya. Adapun pelaksana peremajaan Kegiatan PSR dalam kerangka pendanaan BPDPKS dapat dilaksanakan oleh :

1. Pekebun secara swakelola atau swadaya melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya ;
2. Pekebun melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja Pekebun; atau
3. Mitra kerja pekebun.

Mitra kerja Pekebun merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan. Dalam hal tidak terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan, pelaksana peremajaan dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang terjangkau secara teknis. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2016)

Jika komponen biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat dilakukan secara lebih efisien, maka dana sebesar Rp. 30 Juta per ha/pekebun dianggap cukup. Efisiensi biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengendalikan biaya agar pertindak efisien yaitu hasil akhir tidak jauh menyimpang dari standar yang telah ditentukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar sehingga dapat dicapai suatu efisiensi. Untuk itu, dilakukan Analisis Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada KUD sawit Kita Desa Lampisi Kecamatan renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melihat bagaimana pelaksanaan PSR dari

P0 sampai P3 dapat mendekati dana yang diperoleh dari BPDPKS dan meringankan kemampuan finansial petani.

1.2. Perumusan Masalah

Salah satu masalah yang mengancam masa depan kebun kelapa sawit adalah adanya kebun-kebun kelapa sawit yang tidak produktif lagi karena sudah tua atau rusak. Berdasarkan data Statistik Perkebunan Tahun 2021 terdapat 137.902 Ha kebun sawit yang tidak berproduksi baik atau telah mencapai umur lebih dari 25 tahun atau berproduksi rendah. Luasan tersebut merupakan 12,55% dari luas perkebunan sawit di Provinsi Jambi. Dari jumlah angka tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak (TTM/TR), seluas 34.769 Ha dari perkebunan swasta dan sisanya 103.132 Ha dari perkebunan rakyat. Hampir 75% berasal kebun swadaya dan ini perlu diantisipasi untuk segera diremajakan. (Buku Data Statistik Perkebunan (ATAP) Provinsi Jambi, 2021).

Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 2017. Kegiatan peremajaan diorientasikan sebagai upaya dalam membangun pengelolaan perkebunan kelapa sawit masyarakat/pekebun sesuai dengan standar teknis budidaya kelapa sawit dan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan peremajaan merupakan program kerja dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, luas tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak pada kebun kelapa sawit menunjukkan tren yang terus meningkat, hal ini nampaknya menjadi bahan perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dalam menentukan kebijakan luas target PSR yang juga terus bertambah, namun sayangnya realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2023 nampaknya angka luas tanaman tidak menghasilkan dan tanaman rusak pada kebun kelapa sawit sudah mengalami penurunan, salah satunya menunjukkan program ini cukup berpengaruh secara signifikan dan bermanfaat bagi petani. Namun dalam pelaksanaannya, target realisasi fisik PSR kerangka pendanaan BPDPKS di Provinsi Jambi kerap kali tidak terpenuhi bahkan jauh dari kebutuhan TTM/TR yang perlu diremajakan.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 175/Kpts/SR.210/04/2021 tentang Standar Biaya Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2021, standar biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat meliputi pekerjaan P0 yaitu pembukaan lahan dan penanaman terdiri dari tenaga kerja, infrastruktur, bahan dan alat, P1-P3 yaitu pemeliharaan terdiri dari tenaga kerja serta bahan dan alat. Nilai biaya peremajaan wilayah Jambi berkisar Rp. 46.045.633-Rp. 65.054.633 di lahan kering/mineral. Sedangkan, dalam program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat, BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada pekebun rakyat peserta PSR hanya sebesar Rp. 30 juta per ha/pekebun yang awalnya hanya sebesar Rp. 25 juta per ha/pekebun dengan syarat pekebun mau dan mampu melaksanakan kegiatan PSR yang sesuai anjuran teknis budidaya oleh Pemerintah.

Berdasarkan RKP3KS yang diajukan, biaya Peremajaan Sawit Rakyat yang saat ini Rp 30 juta per hektar/pekebun pada sebagian besar pekebun, masih kurang dari kebutuhan, hanya cukup untuk pembiayaan di tahap awal. Selisih biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang tidak dapat dipenuhi dari bantuan BPDPKS, harus dipenuhi dengan dana lain baik itu tabungan milik pekebun, Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau keduanya. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada Kegiatan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat.

KUD Sawit Kita merupakan kelembagaan yang pertama kali mendapatkan biaya PSR kerangka BPDPKS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahkan saat ini telah mengajukan tambahan PSR tahap 2. Jika komponen biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat dilakukan secara lebih efisien, maka dana sebesar Rp. 30 Juta per ha/pekebun dianggap cukup. Untuk itu, dilakukan Analisis Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat pada KUD Sawit Kita Desa Lampisi Kecamatan renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melihat bagaimana pelaksanaan PSR dari P0 sampai P3 dapat mendekati dana yang diperoleh dari BPDPKS dan meringankan kemampuan finansial petani. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dibuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah fokus masalah yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di KUD Sawit Kita?
2. Apa saja komponen pemanfaatan biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di KUD Sawit Kita?
3. Apakah pemanfaatan biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di KUD Sawit Kita sudah efisien?
4. Bagaimana Rincian Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang efisien untuk KUD Sawit Kita?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan kegiatan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di KUD Sawit Kita.
2. Mengidentifikasi komponen pemanfaatan biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di KUD Sawit Kita
3. Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi pemanfaatan biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di KUD Sawit Kita.
4. Merumuskan Rincian Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang efisien untuk KUD Sawit Kita.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Sebagai salah satu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Jambi
2. Sebagai bahan evaluasi KUD Sawit Kita dalam pemanfaatan biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit secara efisien.
3. Sebagai bahan masukan BPDPKS mengenai Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang sesuai untuk dapat diterapkan.